

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DESA KALAENA KECAMATAN
WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ANGGY RAHMAN
NIM. 10400117012

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggy Rahman
NIM : 10400117012
Tempat/ Tgl Lahir : Pawosoi, 05 April 1999
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum
Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan
Wotu, Kabupaten Luwu Timur

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan rujuk berdasarkan pada kode etik ilmiah.

Luwu Timur, 19 September 2020

Penulis,

Anggy Rahman

PENGESAHAN SKRIPSI

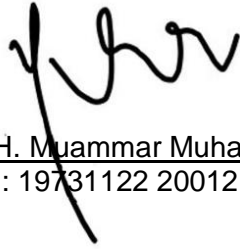
Skripsi ini yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur", yang disusun oleh Anggy Rahman, NIM: 10400117012, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2021 M, bertepatan dengan 4 Rajab 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 16 Februari 2021 M
4 Rajab 1442 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. H. Muammar Muh. Bakry, Lc., M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Marilang, S.H., M.Hum.	(.....)
Pembimbing I	: Istiqamah , S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: St. Nurjannah, S.H., M.H	(.....)
Penguji I	: Erlina , S.H., M.H	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Rahmatiah. HL , M.pd	(.....)

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,


Dr. H. Muammar Muhammad Bakri, Lc., M.Ag.
 NIP : 19731122 20012 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala* yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ditengah pandemi covid-19 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu terdapat kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan positif yang sifatnya membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini masalah dan hambatan tentu ada apalagi ditengah pandemi covid-19 tetapi alhamdulillah semuanya terselesaikan atas izin Allah SWT dan bantuan orang lain. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, ayahanda ABD.Rahman/Beddu dan ibunda Matahari/Tari yang tidak pernah ada kata lelah mendokan dan menyemangati hingga penulis bisa berada pada titik ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu Istiqamah, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan ibu St. Nurjannah, S.H., M.H. selaku pembimbing II atas arahan, dan bimbingannya hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucap terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada ibu Erlina, S.H., M.H. selaku penguji I dan ibu Dr. Hj. Rahmatiah HL, M. Pd selaku penguji II.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Hamdan Juhannis, M.A., Ph. D. selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III, dan IV UIN Alauddin Makassar.

2. Bapak Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M. Ag. selaku Dekan beserta wakil dekan I, II, dan III fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Abd. Rais Asmar, S.H., M.H selaku Sekretaris jurusan Ilmu Hukum fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Akademik dan Pegawai fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
6. Kepada sahabat-sahabat penulis yakni Sri, Sarda, Acid dan Fatwa atas dukungan, motivasi dan doanya selama penulisan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman kelas Ilmu Hukum A atas dukungan dan doanya selama ini.
8. Kepada teman-teman KKN-DK angkatan 64 sektor Wotu atas doa dan dukungannya selama ini.
9. Bapak Yakob Lili, S.H M.H selaku Kanit IDIK III Reskrim Polres Kabupaten Luwu Timur atas kesedian dan waktunya untuk di wawancarai
10. Kepada mantan pemilik tambang pasir ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu kakak Rusdi atas kesediaan dan waktunya untuk diwawancarai.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan dan do'anya selama penyusunan skripsi ini.

Demikian kata pengantar ini semoga skripsi ini memberi manfaat bagi kita semua, atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini penulis meminta maaf untuk itu.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Luwu Timur, 05 September 2020

Penulis,

Anggy Rahman

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13
A. Ruang Lingkup Hukum Pertambangan	13
B. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pemberian Izin Usaha.....	19
C. Hak Penguasaan Negara Atas Bahan Galian.....	22
D. Otonomi Daerah dan Penguasaan Daerah Atas Bahan Galian.....	23
E. Penggolongan Bahan Tambang dan Bahan Galian	25
F. Izin Yang Diperlukan dalam Melakukan Usaha Pertambangan	27
G. Pidana Pertambangan	29
H. Tindak Pidana di Bidang Pertambangan	31
I. Subjek Pidana di Bidang Pertambangan	34
J. Sanksi Yang Dapat di Jatuhkan Pada Kasus Pertambangan Ilegal	36
K. Danpak Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Pertambangan	40
L. Peran Serta Masyarakat dan Pengawasan Pertambangan Oleh Masyarakat	44

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Sumber Data.....	47
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Instrumen Penelitian.....	48
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
 BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN TINJAUAN	
YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN PASIR	
ILEGAL DI DESA KALAENA KECAMATAN WOTU KAUPATEN LUWU	
TIMUR.....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur	50
B. Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur	51
C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur	53
 BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54
 DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Nama : Anggy Rahman
NIM : 10400117012
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu timur

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum penambangan pasir ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan apa faktor penghambat penegakan hukum penambangan pasir ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, dimana peneliti akan meneliti dengan memperhatikan aturan hukum yang dikaitkan dengan objek penelitian. Selain itu, data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber pada data primer. Dimana dalam data tersebut bersumber dari wawancara dengan pihak Kepolisian Resort Luwu Timur, mantan pemilik tambang pasir ilegal dan hasil wawancara dengan warga. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengolahan data kualitatif dan analisis data kualitatif.

Pengelolaan tambang pasir tanpa mengantongi izin usaha tentunya bersifat ilegal. Penambangan tanpa mengantongi izin memicu penambang ilegal semakin bertambah dan pengelolaan nya dilakukan secara liar karena tidak adanya izin terhadap usaha tambang pasir yang mereka miliki. Penambangan pasir ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sejauh ini belum mendapatkan sanksi dan juga penegakan hukum terhadap penambangan pasir ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sejauh ini masih dalam bentuk preventif. Pihak kepolisian hanya memberikan tindakan preventif saja berupa himbauan kepada masyarakat untuk tidak menambang secara ilegal atau mengurus izin usaha pertambangan.

Kata kunci : Tinjauan, Yuridis, Penambangan, Pasir, Ilegal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang harus memiliki kesadaran hukum. Soekanto menegaskan perlunya membangun dan menjaga kesadaran hukum secara konsisten dan berkesinambungan. Bagaimana pun juga sumber satu-satunya dari pembentukan hukum demikian juga dengan dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum adalah, perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak daripada kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai sesuatu peristiwa yang tertentu. Sumber-sumber kesadaran hukum seperti adat istiadat dan agama dengan demikian harus direduksi masuk kedalam hukum perundang-undangan, sehingga akan terbangun budaya hukum dan kesadaran hukum yang menyatukan ketiganya. Bukan tercerai berai seperti selama ini sehingga ketiganya seringkali berkonflik baik dalam tataran budaya hukum terlebih lagi dalam ranah kesadaran hukum.¹ Maka dari itu sangat diperlukan sebuah nilai moral sebagai standar kesadaran manusia. Hukum dan moral adalah bagian terpenting dalam Islam. Keduanya tidak bisa terpisahkan karena keduanya punya hubungan yang erat, saling mempengaruhi dan selalu sejalan-searah satu sama lainnya.² Terlepas dari itu Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan didalam pasal 1 Ayat (3) uud 1945. Konsep negara hukum ini tidak lahir begitu saja, melainkan berangkat dari sebuah kesadaran akan pentingnya sebuah tatanan hukum dalam kehidupan bersama.³

¹ Jayadi, Ahkam. "MEMBUKA TABIR KESADARAN HUKUM." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4.2 (2017): 18

² Sanusi, Nur Taufik. "SYARIAH: ANTARA HUKUM DAN MORAL." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20.1 (2020): 87

³ Karim, Rizal, and Erlina Erlina. "KONTROVERSI VONIS BEBAS KASUS PENGUSAKAN LAHAN KEHUTANAN." *Alauddin Law Development Journal* 2.1 (2020): 58

Nilai moral individual adalah nilai moral yang menyangkut hubungan manusia dengan kehidupan diri pribadi sendiri atau cara manusia memperlakukan diri pribadi. Nilai moral tersebut mendasari dan menjadi panduan hidup manusia yang merupakan arah dan aturan yang perlu dilakukan dalam kehidupan pribadinya.⁴ seperti yang telah diperingatkan oleh Allah SWT dalam firmanNya yang terdapat pada QS. Surah An-Nisa/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁵

Jadi segala sesuatu yang akan dimulai oleh setiap orang maupun badan hukum, harus memiliki kesadaran hukum yaitu dengan selalu mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga dapat bernilai ibadah yang diwajibkan agama dan jika dilakukan dengan baik akan berdampak positif bagi pelakunya.⁶ Termasuk memperhatikan nilai moral yang ada dalam menjalankan suatu usaha. Usaha pasti tidak akan pernah lepas dari pantauan hukum. Seperti halnya dalam menjalankan suatu usaha pertambangan.

Salah satu usaha yang banyak diminati oleh masyarakat baik perorangan maupun perusahaan ialah usaha pertambangan. Berdasarkan UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pertambangan merupakan sebagian

⁴ Andi, Mulyono. *Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia*. Jurisprudentie. Vol. 3 No. 2, (2017), h. 27

⁵ ALWASIM, Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata, QS. Surah Al-Nisa : 59, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013), h. 87)

⁶ Sadat, Anwar. "Strategi Transformasi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 16.1 (2018): 10

atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Yang menjadi pondasi utama dalam pertambangan dan energi yaitu pemanfaatan mineral dan energi yang dimiliki, pemanfaatan potensi kekayaan sumber daya alam dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, sesuai dengan UUD 1945. Pertambangan merupakan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi dan air. Dimana hal tersebut termuat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi "Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Mineral dan batu bara yang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam menentukan wilayah dan kegiatan dalam usaha pertambangan maka pelaku usaha harus memperhatikan pendapat dari instansi pemerintahan terkait masyarakat dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya dan berwawasan lingkungan serta harus memenuhi standar letak geografis, kaidah konservasi, daya dukung lingkungan, memaksimalkan sumber daya mineral atau batu bara dan tingkat kepadatan penduduk.

Tujuan negara salah satunya dalam bidang perekonomian negara adalah untuk mendatangkan devisa negara. Maka dari itu pertambangan adalah salah satu usaha yang dapat mendukung karena negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Adanya usaha pertambangan menjadikan masyarakat Indonesia berlomba - lomba untuk mengadakan usaha pertambangan karena pertambangan merupakan perindustrian yang diketahui dapat mendatangkan keuntungan, bahkan jarang masyarakat yang tidak tahu mengenai sebuah industri pertambangan.

Usaha pertambangan sangat banyak mendatangkan manfaat bagi negara maupun masyarakat. Adapun manfaat pertambangan yaitu membantu meningkatkan perekonomian rakyat, meningkatkan barang dan transportasi dan

lebih mudah mendapatkan barang hasil tambang daripada harus mengimpor dari negara lain. selain manfaat tambang dari segi ekonomi, usaha pertambangan juga mendatangkan manfaat dari segi hasil tambang. Hasil tambang sangat berperan penting bagi manusia. Hasil dari pada pengolahan usaha tambang juga bermanfaat bagi manusia seperti pertambangan yang menghasilkan suatu benda yang dapat bermanfaat bagi manusia.

Meskipun dalam pertambangan memiliki banyak dampak positif berupa manfaat, tetapi didalam dunia pertambangan juga tentu memiliki dampak negatif. Dampak negatif tersebut salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Wilayah yang menjadi area pertambangan akan mengalami pengikisan, sehingga akan menyebabkan erosi. Limbah hasil pengolahan tambang juga dapat mencemari lingkungan. Selain itu kegiatan industri tambang yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan CO₂ yang dapat menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan global.

Pertambangan dalam proses pelaksanaannya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam pertambangan antara lain Banyak nya hasil tambang yang beragam. kegiatan ekspor hasil tambang menjadi meningkat yang membuat devisa negara bertambah dan terbuka nya lapangan pekerjaan. Kelebihan dalam pertambangan ini tentunya akan berdampak baik bagi negara dan akan bermanfaat pula bagi masyarakat Indonesia khususnya pencari kerja. Namun meski pertambangan memiliki beberapa kelebihan, tentunya pertambangan juga tak lepas dari yang namanya kekurangan. Kekurangan dari pertambangan yakni Indonesia masih belum bisa memanfaatkan hasil tambang tersebut karena keterbatasan teknologi. Indonesia kurang diuntungkan dengan kegiatan penambangan yang bekerja sama dengan negara lain seperti Freeport dan masih kurang SDM Indonesia itu sendiri. Melihat perbedaan dari kelebihan dan keuntungan dari pertambangan tentunya kita berfikir bahwa kelebihan dari pertambangan masih belum dapat tercapai dengan maksimal jika kekurangannya masih ada seperti dalam keterbatasan teknologi. .

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki julukan kota tambang. Di Luwu Timur memiliki industri pertambangan

sebagai penghasil tambang nikel dan tambang pasir. PT Vale di Luwu Timur adalah suatu perusahaan yang dulunya bernama PT INCO yang kini PT Vale telah menjadi suatu perusahaan yang memproduksi usaha pertambangan nikel. Namun tambang nikel hanya diproduksi oleh perusahaan dan bukan perorangan.

Salah satu usaha pertambangan selain tambang nikel yang ada di Luwu timur adalah usaha pertambangan pasir. Usaha Tambang pasir terbilang usaha tambang yang banyak diminati oleh masyarakat karena dapat dilaksanakan oleh perorangan. Namun didalam pelaksanaan tersebut terdapat banyak masalah seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), dampak terhadap lingkungan, dan peran penegak hukum (oknum polisi).

Usaha pertambangan terbilang dapat menguntungkan dan juga merugikan bagi pelaku usaha tambang maupun masyarakat sekitar wilayah tambang. Pertambangan yang baik adalah pertambangan yang mengikuti UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dimana dalam aturan tersebut membolehkan dilakukan usaha tambang apabila tidak melewati batas yang telah ditentukan. Namun yang menjadi permasalahan dalam pertambangan sehingga pertambangan tersebut menjadi tidak baik apabila pelaku usaha tambang tidak memperhatikan aturan yang ada dan melakukan usaha tambang dengan hanya mengikuti nafsu mereka dengan dalih hanya ingin mendapat keuntungan. Dalam pengelolaan tambang pasir tersebut beberapa pelaku usaha yang menyalahgunakan kesempatan guna untuk memperoleh keuntungan dan pelaksanaan usaha tersebut tidak dengan tujuan mencapai kemakmuran bersama namun hanya ingin memperkaya diri sendiri.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya salah satu usaha tambang pasir yang berdiri di kabupaten Luwu timur tepatnya di desa Kalaena kecamatan wotu. Kegiatan pertambangan tersebut dilaksanakan tanpa memperoleh izin. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha tambang pasir ilegal tersebut tentunya sudah menyalahi ketentuan undang-undang minerba yang didasarkan pada peraturan baru pada pasal 158 UU No 4 Tahun 2004 tentang Mineral dan Batu Bara yang sebelumnya berbunyi " setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37,

pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dan kini sanksi yang ditentukan di peraturan baru ialah Pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Meski demikian, walaupun usaha tambang tersebut tidak memiliki izin, namun pelaku usaha tambang tetap nekat melanjutkan usahanya dan melakukan penambangan secara liar. Penambangan secara liar yang dilakukan oleh pelaku usaha tambang, harus ditindak lanjuti secara serius. Karena hal tersebut dapat berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Untuk mencegah terjadinya pelaksanaan usaha tambang ilegal, diperlukan keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani masalah pertambangan liar yang terjadi. Seperti yang kita ketahui, tambang ilegal tanpa adanya pengawasan dapat membuat penambang melaksanakan usaha tambang semakin liar karena tidak adanya kontrol dari pemerintah dan pengawasan hukum secara tegas.

Beberapa masalah lainnya dalam pertambangan tersebut ialah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan secara liar terus-menerus. Tidak adanya sanksi dari pihak yang berwajib serta pengawasan pemerintah desa setempat yang membuat pelaku usaha tambang semakin nekat melanjutkan usahanya. Bentuk dan cara mereka dalam melaksanakan tambang sangat tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Dalam pengusahaan tambang tersebut dampaknya sangat dirasakan oleh warga sekitar wilayah usaha tambang. Banyak lahan warga disekitar sungai rusak akibat longsor. Longsor diakibatkan karena sungai yang menjadi sumber penambangan pasir dan dilakukan secara terus menerus dan secara liar tanpa memperhatikan aturan yang ada. Kegiatan usaha tambang pasir memang tergolong kegiatan usaha pertambangan biasa, karena hanya memerlukan peralatan tambang sederhana. Meski demikian, hal tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat pertambangan secara liar semakin menjadi-jadi. Alasannya karena peralatan yang digunakan sederhana jadi membuat pelaku usaha tambang menyepelekan dampak yang akan terjadi. Mereka

hanya memikirkan keuntungan tanpa mereka sadari meski peralatan yang mereka gunakan sederhana namun karena mereka lakukan secara terus menerus sehingga hal tersebut menjadi pemicu utama rusaknya lingkungan.

Tidak hanya lahan warga saja yang menjadi sasaran utama akibat kerusakan lingkungan, beberapa tahun lalu, jembatan yang merupakan penghubung jalan besar di Luwu timur roboh. Walaupun jembatan tersebut tidak rusak parah namun akses kendaraan besar sangat sulit melewati jembatan tersebut karena takut terjatuh. Akibat robohnya ujung jembatan membuat aktivitas perjalanan orang banyak terhalangi. Tidak hanya orang yang akan melewati jalan itu saja yang terhalang namun beberapa warga setempat juga sulit untuk melewati jalan tersebut karena macet disekitar jalan akibat pelan-pelannya kendaraan yang akan melewati jembatan tersebut. Tingkat erosi di lokasi penambangan pasir adalah moderat dan ringan dan menimbulkan dampak fisik lingkungan seperti tanah longsor, berkurangnya debit air permukaan (mata air), tingginya lalu lintas kendaraan membuat mudah rusaknya jalan, polusi udara, dan dampak sosial ekonomi. Meski telah diketahui secara terang - terangan bahwa rusaknya lingkungan diakibatkan oleh tambang pasir, namun tidak ada suara warga setempat yang terdengar menyuarakan mengenai kerusakan tersebut, bahkan warga yang lahannya menjadi korban kerusakan tersebut tidak meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha tambang. Perilaku manusia yang eksploitatif dan destruktif dan tidak peduli terhadap alam, berakar pada cara pandang yang hanya mementingkan kepentingan manusia.⁷

Maka dari itu pelaksanaan usaha tambang pasir harus lebih ditekankan mengenai batasan-batasannya agar tidak merusak tatanan lingkungan apalagi memasuki milik pribadi masyarakat setempat. Karena Meskipun telah jelas diatur dalam pasal 158 UU No 4 Tahun 2004 tentang mineral dan Batu Bara bahwa penambang ilegal akan diberikan sanksi, tapi pada kenyataannya pelaku usaha penambangan Ilegal tidak menerima hukuman atau sanksi pidana sama sekali. Karena itu dalam hal ini betul-betul mempertegas mengenai penegakan hukum

⁷ Jamal, Ria Khaerani. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020 : 41

terhadap penambangan pasir ilegal guna mewujudkan penegakan hukum yang bertanggung jawab serta mendukung pengawasan penegakan hukum.⁸ Sudah sekitar 3 tambang pasir ilegal dalam 10 tahun ini terus beroperasi tanpa adanya izin dimulai pada tahun 2010-2020, dan itu dilakukan oleh beberapa pengusaha tambang yang berbeda dalam kurun waktu yang sama. Untuk mempersingkat pembahasan, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti suatu kasus yang akan dituangkan kedalam skripsi dengan judul **“Tinjaun Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu timur”**.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian merupakan rangkaian bentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian, sedangkan Deskripsi fokus adalah penjelasan satu persatu mengenai variable dari sebuah judul.

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, karena dalam titik fokus penelitian ini adalah judul penelitian itu sendiri yang merupakan pusat dalam topik penelitian yang telah menjelaskan secara langsung gambaran yang akan menjadi sebuah masalah dalam penelitian tersebut.

2. Deskripsi Fokus

Deskripsi fokus adalah suatu penggambaran secara umum mengenai fokus penelitian pada suatu fenomena yang akan diteliti.

- a. Penegakan adalah proses, cara, perbuatan untuk menegakkan.
- b. Hukum adalah peraturan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis.

⁸ Samin, Sabri. "Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum." Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 3.1 (2014): 21

- c. Penambangan adalah kegiatan penggalian Sumber Daya Alam (SDA) atau pemanfaatan SDA dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- d. Pasir adalah Bahan material butiran
- e. Ilegal adalah tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.
- f. Kalaena merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan Wotu yang menjadi tempat berdirinya beberapa tambang pasir.
- g. Wotu merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur
- h. Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang merupakan daerah yang dijuluki kota tambang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur”. Agar pembahasan tidak terlalu meluas, maka dibatasi dengan sub pokok masalah di bawah ini yaitu :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur ?
2. Apa Faktor Penghambat Penegakan Hukum Penambangan Pasir Secara Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah daftar referensi yang diambil dari buku, jurnal, papers, artikel, disertasi, skripsi dan lain-lain, yang dikutip dalam penulisan proposal. Adapun beberapa daftar dari kajian pustaka berikut :

1. Nova Yanti Siburian dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Bahan Galian C di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan”. Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum kepada pelaku penambangan pasir ilegal, faktor yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan hukum

terhadap pelaku penambangan pasir ilegal dan peran pemerintah kabupaten kuantan Singingi yang ditinjau berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan.

2. Riswandi dengan judul skripsi “penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal”. Skripsi menggunakan pendekatan empiris dalam penelitiannya. Skripsi ini juga membahas mengenai putusan hakim dalam penyelesaian kasus tambang pasir ilegal.
3. H. Salim, dengan judul buku “Hukum Pertambangan di Indonesia” . Buku ini menjelaskan materi-materi tentang hukum pertambangan yang ada di Indonesia, yang menjelaskan mengenai pengertian dan asas hukum pertambangan, penggolongan bahan galian, Kuasa pertambangan, aspek Hukum pertambangan rakyat, konsep teoritis dan momentum terjadinya kontrak karya, batu bara, dan kajian sosio-yuridis terhadap program pengembangan masyarakat lingkaran tambang. Materi-Materi tersebut menganalisis secara hukum mengenai pertambangan di Indonesia.
4. Samsul Wahidin, dengan judul buku “Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa izin Kontemporer”. Buku ini menjelaskan materi yang memuat masalah pertambangan tanpa adanya izin. Untuk mengatasi masalah pertambangan, pelaksanaannya harus tunduk kepada hukum. Namun tidak sedikit orang yang tidak tunduk pada hukum, dan hal inilah yang membuat sulitnya mengatasi masalah pertambangan. Salah satunya adalah tindakan melakukan tambang tanpa adanya izin.
5. Gatot Supramono dengan judul buku “Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia”. Buku ini menjelaskan materi mengenai Pengertian pertambangan, Asas Pertambangan, wilayah dan usaha pertambangan.
6. Adrian Sutedi, dengan judul buku “Hukum Pertambangan”. Buku ini menjelaskan materi tentang kebijakan pemerintah di bidang pertambangan dan tinjauan terhadap UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

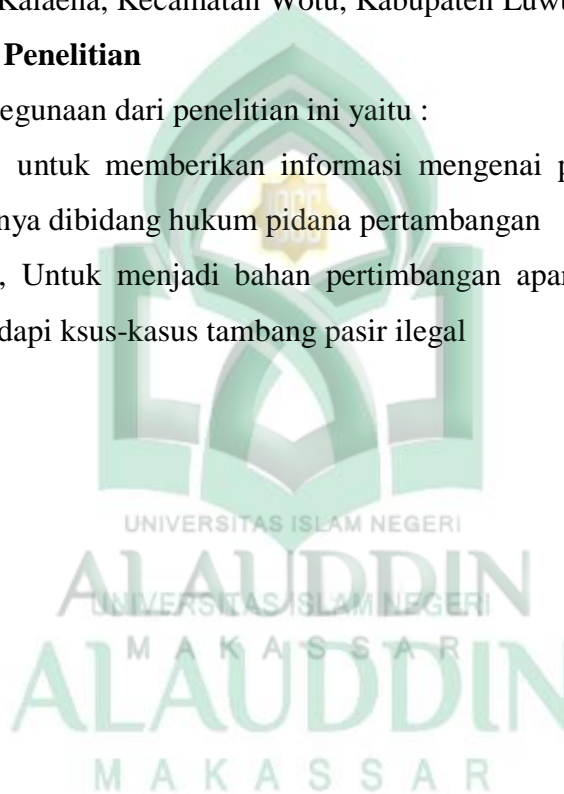
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur ?
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur ?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

- a. Secara Ilmiah, untuk memberikan informasi mengenai perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana pertambangan
- b. Secara Praktis, Untuk menjadi bahan pertimbangan aparat penegak hukum dalam menghadapi ksus-kasus tambang pasir ilegal



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ruang Lingkup Hukum Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Menurut UU No 4 tahun 2009 dalam pasal 1 angka (1) undang-undang minerba, pertambangan adalah "sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyeklidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca-tambang". Pengertian ini memberikan pemahaman tentang aktivitas pertambangan dalam arti luas, yaitu keseluruhan kegiatan sejak pra penambangan sampai proses dan pasca tambang.

Mineral sendiri merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau tabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batu bara adalah endapan senyawa organik kotor yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Pengertian ini diatur dalam pasal 1 angka (2) dan (3) UU No 4 tahun 2004 tentang mineral dan batu bara.. Adanya pengertian keduanya sangat penting, mengingat bahan tambang tidak hanya mineral dan batu bara, tetapi ada juga pertambangan minyak dan gas bumi.

Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba yang telah diubah dengan PP Nomor 26 Tahun 2012, ditentukan 5 golongan komoditas tambang, meliputi mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batu bara.

Kelima penggolongan tersebut terbagi dalam beberapa golongan. Beberapa diantaranya adalah uranium yang masuk dalam golongan mineral radioaktif emas, tembaga, perak, seng, timah, besi dan aluminium sebagai mineral logam. Kemudian intan, asbes, belerang, kaolin, zircon dan tawas sebagai mineral non logam. Marmer, granit, tanah liat, batu apung, dan giok sebagai batuan.

Terakhir, batu bara terbagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

Sementara usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Setiap tahapan kegiatan memiliki tujuan dan fungsi guna menjamin pertambangan yang baik, menjaga lingkungan dan berkelanjutan.⁹ Jadi, pertambangan merupakan kegiatan yang dapat mengolah bahan pokok untuk keperluan dan kebutuhan manusia.

2. Asas – Asas Hukum Pertambangan

Didalam Hukum Pertambangan terdapat asas-asas yang menjadi acuan dalam pertambangan. Asa tersebut digolongkan menjadi 2 yaitu asas yang mengatur Mineral dan Batubara dan asas yang mengatur tentang Minyak Gas dan Bumi. Pasal 2 UU No 4 Tahun 2009 mengatur bahwa pertambangan mineral dikelola berasaskan :

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Disamping asas-asas itu, di dalam pasal 2 UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi telah ditentukan secara jelas asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pertambangan minyak gas dan Bumi. Asas-asas tersebut ialah :

- a. Asas ekonomi kerakyatan
- b. Asas keterpaduan
- c. Asas Manfaat
- d. Asas keadilan
- e. Asas keseimbangan
- f. Asas pemerataan

⁹ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan*, (Bangka Belitung: UBB Pers, 2018), h.21

- g. Asas kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat
- h. Asas keamanan dan keselamatan
- i. Asas kepastian hukum
- j. Asas berwawasan lingkungan ¹⁰

Asas dalam hukum pertambangan terbagi atas dua yaitu asas yang mengatur tentang Mineral dan Batubara dan asas yang mengatur tentang Minyak Gas dan Bumi.

3. Tujuan Hukum Pertambangan

Hukum Pertambangan juga memiliki tujuan didalam pelaksanaan pengelolaannya. Tujuan tersebut tertuang pada pasal 3 UU No 4 Tahun 2009 mengatur bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. Efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, dan berdaya saing.
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri
- d. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- e. mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat
- g. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Tujuan pengelolaan pertambangan di atas pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas yang dibahas sebelumnya. Tujuan yang berisi tentang prinsip-prinsip manfaat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,

¹⁰ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan*, (Bangka Belitung: UBB Pers, 2018), h.24

keberpihakan nasional dengan menjaga kebutuhan dalam negeri dan mendukung perekonomian nasional dan lokal, serta menjamin kepastian hukum.¹¹ Tujuan pertambangan tidak lain adalah untuk memberikan kemanfaatan dan pemenuhan kebutuhan bagi manusia, dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

4. Sumber – Sumber Hukum Pertambangan

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materi ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional dan keadaan geografis. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebutkan peraturan hukum formal itu berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan kebiasaan. Adapun yang menjadi sumber hukum pertambangan yaitu,

a. *Indische Mijn Wet (IMW)*

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan.¹² Semua yang berkenaan dengan hukum sudah pasti memiliki asal-usul. Asal-usul tersebut dinamakan sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, dan oleh karena itu sumber hukum memberikan bayangan bahwa setiap pelanggarnya akan diberikan sanksi yang nyata.

b. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Hubungan UU Nomor 5 tahun 1960 dengan pertambangan erat kaitannya dengan pemanfaatan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan di bidang pertambangan.

¹¹ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan*, (Bangka Belitung: UBB Pers, 2018), h.25

¹² Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan*, (Bangka Belitung: UBB Pers, 2018), h.21

- c. UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
UU No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ditetapkan pada tanggal 2 Desember 1967. Dimana UU ini mengedapankan prinsip pancasila.
- d. UU No 2 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi
- e. UU ini ditetapkan pada tanggal 23 November 2001. UU ini bertujuan untuk melakukan reformasi disegala bidang kehidupan bangsa yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.¹³

Sumber-Sumber Hukum pertambangan ada 4 yaitu Indische Mijl Wet (IMW), UU No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, UU No 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan dan UU No 22 tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi.

B. Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pemberian Izin Usaha

1. Kewenangan Pemerintah Pusat

Pasal 9 UU Nomor 4 tahun 2009, ditetapkan bahwa wilayah pertambangan (WP) merupakan bagian dari tata ruang nasional yang ditetapkan oleh pemerintah (pusat) setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan perwakilan Rakyat. Adapun Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara antara lain, adalah :

- a. penetapan kebijakan nasional
- b. Pembuatan peraturan perundang-undangan
- c. Penetapan standar nasional, pedoman dan kriteria
- d. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batu bara nasional
- e. Penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Republik Indonesia
- f. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berada apda lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.

¹³ H. Salim, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.17-21

- g. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.

2. Kewenangan Pemerintah Provinsi

Selain daripada kewenangan dari pemerintah pusat, adapun kewenangan pemerintah provinsi dalam penggolongan pertambangan mineral dan batu bara adalah :

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah
- b. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) daerah
- c. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- d. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- e. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data informasi mineral dan batu bara sesuai dengan kewenangannya.
- f. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi.
- g. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi.

3. Kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten

Telah dijelaskan sebelumnya kewenangan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi. Adapun kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota dalam pertambangan mineral dan batu bara adalah :

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daedera
- b. Pemberian IUP, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.
- c. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan dan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.
- d. enginventarisasiann, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara
- e. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara secara informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota.
- f. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara lada wilyah kabupaten kota
- g. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.¹⁴

Ada 3 macam kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah. Kewenangan tersebut dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten.

C. Hak Penguasaan Negara Atas Bahan Galian

Hak negara menguasai atau hak pengusahaan negara merupakan konsep yang didasarkan pada organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat. Hak pengusahaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian serta berkewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan tujuan dari setiap pengelolaan dan penggunaan sumber daa alam nasional.

¹⁴ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan*, (Bangka Belitung: UBB Pers, 2018), h.107

Didalam pasal 2 Rancangan Undang-Undang Pertambangan umum disebutkan bahwa bahan galian sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Pengusahaan bahan galian oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah meliputi Inventarisasi, penyelidikan dan penelitian, pengaturan, pemberian izin serta pembinaan dan pengawasan pengusahaan bahan galian di wilayah hukum pertambangan Indonesia.

Inventarisasi adalah suatu kegiatan untuk melakukan pendataan terhadap potensi bahan galian yang terdapat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Penyelidikan merupakan usaha untuk memperoleh informasi tentang bahan galian yang terdapat didalam perut bumi Indonesia. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi atau endapan bahan galian dan gambaran umum kualitas, sumber daya terdapat dari endapan yang dilakukan dengan cara penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, secara regional dan pengambilan secara random (pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang Pertambangan Umum).¹⁵

Pengaturan merupakan usaha dari negara untuk mengatur (menyusun) dan mengurus bahan-bahan galian yang terdapat di dalam perut bumi Indonesia. Pemberian izin merupakan usaha negara untuk memberikan kepada perorangan dan atau badan hukum dalam rangka pengusahaan bahan galian. Pembinaan merupakan usaha tindakan dari negara dalam rangka pengusahaan bahan-bahan galian sehingga dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Sementara itu pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh negara atas pelaksanaan kegiatan pengusahaan bahan galian.

D. Otonomi Daerah dan Penguasaan Daerah Atas Bahan Galian

¹⁵ H. Salim, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.48-49

1. Otonomi Daerah dan Penguasaan Daerah

Sebagai sumber hukum tertinggi dalam melakukan pengelolaan dan pengusahaan terhadap sumber daya alam (SDA) di Indonesia adalah pada 33 ayat 3 UUD 1945. Didalam pasal tersebut dirumuskan bahwa negara adalah pemilik atas tanah, karena itu memiliki segala wewenang melakukan segala tindakan yang bersifat kepemilikan (*eigensdaad*). UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Agraria (UUPA) merumuskan makna “hak menguasai negara” sebagai wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan perubahan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa¹⁶

Dalam UU No. 11 tahun 1967 (ketentuan pokok pertambangan/UUP yang telah diganti dengan UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batu Bara. Dalam UU ini disebutkan

- 1) Terhadap bahan galian golongan c, pelaksanaan, penguasaan negara dan pengaturannya dilakukan oleh pemerintah provinsi
- 2) Terdapat bahan galian golongan b dapat diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Ketentuan diatas menunjukkan :

- a) Pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian golongan c sepenuhnya diserahkan kepada daerah (dalam hal ini daerah Tingkat 1)
- b) Pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian golongan b dapat dilakukan pusat atau daerah. Wewenang daerah tergantung pada kebijakan pusat.¹⁷

Pemberian otonomi luas diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.124

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.130

peran serta masyarakat. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.¹⁸

Jadi, pertambangan juga dapat dijalankan sesuai dengan kewenangan dari daerah tempat pertambangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Penggolongan Bahan Tambang atau Bahan Galian

Bahan galian atau bahan tambang memiliki karakteristik yang berbeda. Bahan tambang tersebut digolongkan berdasarkan Nilai strategis, Nilai Vital dan Bahan Galian yang tidak termasuk strategis dan vital.

1. Penggolongan Bahan Galian Strategis/Ekonomis

Bahan tambang atau bahan galian memiliki nilai strategis/ekonomis terhadap negara. Adapun yang tergolong kedalam tambang dengan nilai strategis/ekonomis antara lain :

- a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam
- b. Bitumen padat, aspal
- c. Antrasit, batu bara, batu bara muda
- d. Uranium, Radium, thorium dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya
- e. Nikel, kobal
- f. Timah

2. Penggolongan Bahan Galian Vital

Penggolongan bahan galian yang memiliki nilai vital dipengaruhi terhadap sesuatu bahan galian dalam alam (*geneses*). Adapun yang menjadi jenis bahan galian vital antara lain :

- a. Besi, mangan, molibden, khrom, Wolfram, vanadium, Titan

¹⁸ Sukanto Satoto, Bader Johan Nasution, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Untuk Tata kelola Pemerintahan Yang Baik*, Sains Sasio Huaniora Vol. 3 No. 1, (2019), h. 72

- b. Bauksit, tembaga, timbal, seng
- c. Emas, platina, perak, air, raksa, intan
- d. Arsin, antimon, bismut
- e. Yttrium, rutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya
- f. Berillium, korundum, Zirkon, kristal kwarsa,
- g. Kriolit, flourspar, barit
- h. Yodium, brom, klor, belerang

3. Peggolongan Bahan Galian Yang Tidak Termasuk Golongan Strategis dan Vital

Selain bahan galian atau bahan tambang yang bernilai strategis dan juga vital, adapun bahan galian yang tidak termasuk kedalam golongan strategis dan golongan vital antara lain :

- a. Nitratt-nitrat, Pospat, Garam batu
- b. Asbes, Talk, Mika, Grafit magnesit
- c. Yarosit, Leusit, Tawas (alum), Iker
- d. Batu permata, Batu setengah permata
- e. Pasir kwarsa, Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonit
- f. Batu apung, Tras, Absidian, Perlit, Tanah diatome, Tanah serap
- g. Marmer, Batu tulis
- h. Batu kapur, Dolomit, kalsit
- i. Granit, Andesit, Bas, Trakhir, Tanah liat, Tanah pasir dan sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan B.

Berdasarkan uraian diatas, maka penggolongan bahan tambang terbagi menjadi 3 yaitu, golongan strategis/ekonomis, vital dan golongan yang tidak termasuk kedalam nilai strategis/ekonomis dan vital.

F. Izin Yang Diperlukan Dalam Melakukan Usaha Pertambangan

1. Izin Lingkungan

Izin lingkungan diatur dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan, bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Oleh karena izin

lingkungan wajib dimiliki oleh setiap perusahaan, maka izin tersebut sifatnya umum dan mutlak.

Pengaturan yang mewajibkan pengusaha wajib memiliki izin lingkungan karena pemerintah bermaksud serius untuk mengawasi lingkungan hidup dan ingin mewujudkan keadaan lingkungan hidup yang baik dan lebih sehat ke masa depan. Izin lingkungan sebagai syarat utama yang wajib dimiliki perusahaan sebelum perusahaan memperoleh izin-izin lainnya yang diperlukan. Kedudukan izin lingkungan sebagai dasar untuk memperoleh izin usaha perusahaan.¹⁹

Sangat jelas terlihat bahwa yang paling utama dalam pelaksanaan usaha pertambangan ialah memperoleh izin lingkungan.

2. Izin Usaha Pertambangan

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP eksplorasi wajib memuat nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah, rencana umum tata ruang, jaminan kesungdaera, pajak sampai dengan AMDAL. Jangka waktu pemberian IUP eksplorasi diatur sesuai dengan golongan mineralnya.²⁰
- b. IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. IUP operasi produksi wajib memuat nama perusahaan, lokasi dan luas penambangan, dana jaminan reklamasi dan pascaambang, penyelesaian perselisihan, pajak sampai teknologi yang digunakan jangka waktu pemberian IUP diatur sesuai dengan golongan mineralnya.

3. Izin Pertambangan Rakyat

Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan menjadi 4

¹⁹ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.19-20

²⁰ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.24

(empat) macam yaitu pertambangan mineral non logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan dan pertambangan batubara.

Adapun mengenai luas wilayah untuk pemberian IPR, ketentuan pasaln68 (1) UU No. 4 tahun 2009 menyebutkan bahwa luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan adalah perseorangan paling banyak 1 (satu) ha, kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) ha, dan koperasi paling banyak 10 (sepuluh) ha. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu yang sama.

4. Izin Usaha Pertambangan Khusus

Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Pejabat yang berwenang memberikan IUPK adalah Menteri ESDM. IUPK diberikan Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. Pemberian IUPK dilakukan dengan prinsip satu izin satu tambang. Menteri memberikan untuk satu jenis mineral logam atau batu bara dalam 1 (satu) WIUPK.²¹

Perizinan merupakan salah satu fasilitas pelayanan publik. Pelayanan perizinan dianggap salah satu faktor penghambat masuknya investasi. Hal ini terlihat dari banyaknya tahap-tahap yang harus dilalui sebelum memulai bisnis di Indonesia. Pelayanan perizinan merupakan salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Buruknya kinerja pelayanan perizinan oleh pemerintah bukan saja terjadi di tingkat nasional namun yang paling krusial justru di tingkat daerah.

Beberapa masalah yang sering menjadi keluhan publik terkait pelayanan birokrasi pemerintahan oleh aparat diantaranya yaitu Memperlambat proses penyelesaian suatu izin, Mencari berbagai dalih, seperti kekuranglengkapan dokumen pendukung, keterlambatan, pengajuan permohonan, dan dalih lain yang

²¹ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.33

sejenis, Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain, Sulit dihubungi, dan Senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata-kata “sedang diproses”²².

Dalam melakukan usaha pertambangan, maka terdapat 4 macam izin yang diperlukan tergantung jenis tambang yang dikelola. Izin tersebut ialah Izin Lingkungan, Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

G. Pidana Pertambangan

1. Ketentuan pidana pertambangan

Ketentuan pidana di bidang pertambangan di atur secara khusus di dalam UU pertambangan, yaitu pada pasal 158 sampai dengan pasal 165. Dengan pengaturannya tersebut kedudukannya sebagai tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan bahaya dalam berbagai bidang yang berakibat dapat merugikan masyarakat.

2. Tujuan diaturnya pidana pertambangan

Diaturnya tindak pidana didalam UU pertambangan tidak dapat dilepaskan dari teori dasar tentang penghukuman. Menurut teori absolut hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Sedangkan teori relatif dilandasi oleh beberapa tujuan yaitu :

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan sebuah hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*spesiale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

²² Nazaruddin Latif, *Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara* Panorama Hukum Vol. 2 No. 2, (2017), : 150

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana akan merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya kembali kepada masyarakat dan dapat menjadi orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman dengan mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman dengan pidana seumur hidup.²³

H. Tindak Pidana di Bidang Pertambangan

Dalam bidang pertambangan tidak lepas dari sebuah tindak pidana. Adapun jenis-jenis tindak pidana dalam bidang pertambangan antara lain :

1. Tindak Pidana Melakukan Penambangan Tanpa Izin

Sebagaimana telah diketahui bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib memiliki izin dari negara atau pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan tanpa izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU pertambangan.

2. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Palsu

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh

²³ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.247

karena pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah ditur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan pasal 159 UU pertambangan.²⁴

3. Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa Hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi.

Oleh karena melakukan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksploitasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman berdasarkan pasal 160 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009.

4. Tindak Pidana Sebagai Pemegang IUP Eksplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Operasi Produksi

Oleh karena terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaanya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat (2) UU No. 4 tahun 2009.

5. Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang

Pada kegiatan keuangan dan perbankan dikenal dengan adanya pencucian uang atau *moneylaundering*. Dimana uang dari hasil kejahatan dicuci melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap bersih. Kegiatan tindak pidana pencucian barang tambang (*mining laundering*) pada UU pertambangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.

²⁴ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.248

6. Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan

Gangguan yang terjadi pada aktivitas penambangan oleh pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, seperti misalnya warga yang merasa dirugikan biasanya akan melakukan protes dengan menghalangi kegiatan penambangan dengan melakukan berbagai cara agar penambangan tidak dapat diteruskan. Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 162 UU No. 32 Tahun 2009.

7. Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberi Izin.

Ketentuan pidana lebih banyak dijatuhkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang dijatuhkan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana pasal 165 UU pertambangan.²⁵

Ada 7 jenis tindak pidana dalam bidang pertambangan yaitu Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin, Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Palsu, Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa Hak, Tindak Pidana Sebagai Pemegang IUP Eksplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Eksplorasi Produksi, Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang, Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang, dan Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberi Izin.

1. Subjek Pidana Dalam Tindak Pidana di Bidang Pertambangan

Rumusan tindak pidana di dalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata *barangsiapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan mengenai

²⁵ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.249-252

pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya adalah manusia atau *persoon*. Setiap tindak pidana pasti akan dilakukan oleh subjek dari tindak pidana itu sendiri. Adapun Subjek dari tindak pidana pertambangan antara lain :

1. Orang Perorangan

Perorangan adalah orang atau seorang diri yang melakukan perbuatan pidana dibidang pertambangan. Seperti yang dijelaskan pada jenis-jenis tindak pidana dibidang pertambangan yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah manusia atau orang perorangan.²⁶

Subjek tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau perseorangan adalah tindak pidana yang murni dilakukan oleh satu orang saja.

2. Badan Hukum

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terikat suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Dalam tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana yang diatur pada pasal 163 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009.²⁷

Badan-badan hukum atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus dikaitkan dengan *strict liability*, karena suatu korporasi sulit untuk dilihat dari hal “mampu bertanggungjawab” atau melihat korporasi melakukan tindak pidana dengan kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, sehingga lebih baik melihat korporasi yang telah melakukan tindak pidana maka hukuman pidana merupakan suatu konsekuensi. Dimaksudkan dengan *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin pelaku.²⁸

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Cet. 8 Depok: Rajawali Pers, 2017), h.54

²⁷ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.253

²⁸ Syarif Saddam Rivantie, *Hukuman Pidana Akibat Kerusakan Lingkungan Yang dilakukan Oleh Korporasi dalam Industri Tambang*, *Jurisprudentie Vol. 6 No. 2*, 2019, Hal 197

Subjek tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dalam sebuah kelompok yang terorganisir dan juga telah secara hukum.

J. Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Pada Kasus Pertambangan Ilegal

Dalam kasus pertambangan ilegal, pelakunya akan dijatuhi sanksi. Adapun sanksi yang akan dijatuhi pada kasus tambang ilegal adalah sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi.

1. Sanksi Pidana

Dalam hukuman pidana dikenal adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana dibidang pertambangan dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda yang merupakan hukuman pokok.

Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dan dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana ²⁹

Bahwa beberapa peraturan pelaksanaan dan kebijakan dalam bidang pertambangan telah diterbitkan guna mendukung kegiatan dan usaha pertambangan antara lain sebagai berikut :

- 1) PP No.55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan mineral dan batubara
- 2) PP No.24 Tahun 2012 tentang perubahan PP No.23 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batubara
- 3) PP No.1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

Peraturan Presiden RI No.3 Tahun 2013 tentang pembentukan tim evaluasi untuk kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.

²⁹ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.254

Bahwa peraturan pelaksanaan tersebut, terkait masalah proses perizinan usaha pertambangan dan aspek pengawasan atau pengendaliannya serta berbagai ketentuan persyaratan teknis administrasi dan fungsional penyelenggaraan kegiatan dan usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara.³⁰

Sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dapat berupa penjara dan denda sedangkan pidana tambahan dapat berupa penyitaan atau perampasan terhadap barang-barang yang digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana.

2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Dalam pasal 1365 KUHPerdata, dijelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Maka dalam hukum perdata pelanggaran terhadap hukum pertambangan, akan dikenai sanksi :

- a. Memberikan ganti rugi yang layak kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bertanggungjawab terhadap gugatan masyarakat ke pengadilan yang terkena dampak negatif akibat usaha penambangan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat yang merasa dirugikan atau terkena dampak negatif dari pelaksanaan usaha penambangan berhak untuk meminta ganti kerugian dan mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

³⁰ Bedah Hukum, Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, <http://asa-keadilan.blogspot.com/2014/04/tindak-pidana-dibidang-pertambangan.html?m=1>, (Diakses pada 13 Mei 2020 pukul 19.39)

³¹ Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-Undang KUHper-KUHP-KUHAP beserta penjelasannya*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h.372

Sanksi perdata dapat berupa penggantian ganti kerugian terhadap kesalahan yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan serta bertanggungjawab atas gugatan masyarakat.

3. Sanksi Administrasi

Prosedur penerbitan IUP yang tidak sesuai dengan prosedur, dapat dinyatakan tidak sah, karena mengandung cacat yuridis yang bersifat administratif, dimana tidak sesuai dengan salah satu persyaratan keabsahan dari suatu penetapan pejabat publik tidak sesuai dengan prosedur pembentukannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan demikian penetapan dapat dicabut dengan inisiatif sendiri oleh perbuatannya ataupun dapat disebut oleh pihak yang berwenang dengan diajukan *judicial review* ke PTUN. Sanksi administratif dapat diberikan terhadap penerbitan izin yang tidak sah atau mengandung cacat yuridis sebagaimana yang disebut dalam pasal 151 UU No. 4 Tahun 2009.

- a. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan³²
- b. Sanksi administrasi berupa
 - 1) Peringatan tertulis
 - 2) Penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi
 - 3) Pencabutan IUP, IPR dan IUPK³³

Pemberian sanksi administratif terhadap pelaku illegal mining, secara konsep terdapat (dua) jenis instansi dan bupati yang berperan mengeluarkan keputusan pengenaan sanksi. Instansi yang dimaksud adalah instansi pengawas dan instansi penegak sanksi (penertiban). Instansi pengawas dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan sebagai instansi pemegang otoritas dibidang pertambangan, dan Badan Lingkungan Hidup sebagai pemegang otoritas

³² Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, (Cet. 1 Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h.178

³³ H. Salim, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.179

terhadap lingkungan dalam hal ini lingkungan sebagai akibat dari aktifitas illegal mining.³⁴

Sanksi administrasi dalam usaha pertambangan dapat berupa pemberhentian sementara terhadap usaha pertambangan dan pencabutan surat izin.

K. Dampak Pelaksanaan Pembangunan di Bidang Pertambangan

Dalam pelaksanaan pembangunan tentunya pertambangan sangat berperan penting dalam situasi pembangunan tersebut. Adapun dampak pertambangan terhadap pembangunan antara lain :

1. Dampak Positif

Setiap kegiatan pembangunan dibidang pertambangan tentunya tidak akan lepas dari dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang pertambangan yaitu :

- a. Memberikan nilai tambah secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
- b. Memberikan peningkatan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
- c. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkaran tambang
- d. Memberikan peningkatan terhadap ekonomi masyarakat lingkaran tambang
- e. Memberikan peningkatan terhadap usaha mikro masyarakat lingkaran tambang
- f. Memberikan peningkatan terhadap kualitas SDM masyarakat lingkaran tambang
- g. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkaran tambang

2. Dampak Negatif

- a. Hancurnya Lingkungan Hidup
- b. Memberikan penderitaan terhadap masyarakat adat
- c. Turunnya kualitas hidup penduduk lokal
- d. Bertambahnya kekerasan terhadap perempuan
- e. Munculnya pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan
- f. Hancurnya ekologi pulau-pulau³⁵

³⁴ Natalia, Budi Utami, Muhammad Azhar, *Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Illegal Mining*. Diponegoro Law Vol.6 No. 2, (2017), h. 11

Pertambangan mendatangkan manfaat bagi hidup manusia, terutama mengurangi tingkat pengangguran karena terbukanya lapangan pekerjaan. Namun demikian, sangat sedikit manfaat positif yang didapatkan oleh pelaksanaan usaha tambang, karena dampak negatif yang sangat besar. Misalnya kerusakan lingkungan. Maka dari itu perbandingan antara dampak positif dan negatif pertambangan ialah, 10 : 1. Yang artinya satu saja dampak negatif dari pertambangan akan mengalahkan 10 manfaat pertambangan, terutama dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan.

Kegiatan penambangan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekiranya adalah kegiatan penggalian atau pengerukan atau penambangan, pengangkutan dan reklamasi lahan bekas penambangan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengerukan atau penambangan, akibat pengerukan atau penambangan adalah terbentuknya cekungan-cekungan bekas penambangan. Dengan cara menerapkan penambangan yang baik dan benar serta pertimbangan aspek lingkungan tidak akan menimbulkan dampak negatif.
- 2) Kualitas udara, dampak dari kualitas udara adalah peningkatan konsentrasi debu (partikulat) akibat aktivitas pengerukan atau penambangan dan pengangkutan, terutama berlangsung pada musim kemarau. Kuantitatif dampak relative kecil, hanya disekitar lokasi penggalian dan jalur transportasi yang dilalui dan berlangsung hanya untuk sementara waktu selama oprasi.
- 3) Kualitas air, dampak terhadap kualitas air adalah perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi perairan.
- 4) Perubahan tata guna lahan, dampak bersifat lokal dalam skala kecil dan bersifat sementara.
- 5) Kebisingan, ditimbulkan oleh suara mesin alat berat (*backhoe dan truck hercules*) yang menunjang aktivitas pengerukan/penambangan.
- 6) Pengangkutan, beberapa komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak dari kegiatan ini adalah ketenagakerjaan dan pendapatan.

³⁵ H. Salim, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.57

Kegiatan ini berdampak positif bagi penduduk disekitar lokasi kegiatan, karena dapat membuka kesempatan kerja, memacu pertumbuhan sekitar sektor ekonomi masyarakat.³⁶

Sebagai peraturan bersifat imperatif, ketentuan yang mewajibkan perusahaan memiliki izin lingkungan diikuti dengan sanksi hukum. Apabila perusahaan yang melakukan kegiatan usaha belum atau tidak memiliki izin tersebut maka perbuatannya merupakan tindak pidana dibidang lingkungan hidup yang diatur dalam pasal 109 UU PPLH. Semua tindak pidana yang melanggar UU PPLH merupakan tindak kejahatan dan pelakunya diancam dengan hukuman kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang kadarnya sangat berat.³⁷

Sebagaimana yang telah disebutkan Allah dalam QS Al-Rum/30:41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Terjemahan :

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena tangan manusia. Maka Allah menghendaki agar mereka menyadari sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.³⁸

Demikian arti dari surah Ar-Rum dimana Allah secara tegas menegur manusia-manusia untuk berbuat kerusakan dan juga sebagaimana yang disebut dalam QS Al-A'raf/7:56 yang berbunyi :

³⁶ Geo Media, Dampak penambangan Terhadap Lingkungan, <https://geo-media.blogspot.com/2016/08/dampak-penambangan-terhadap-lingkungan.html?m=1>, (Diakses pada tanggal 11 Mei 2020 pukul 16.26).

³⁷ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.20

³⁸ ALWASIM, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata, QS. Surah Al-Rum : 30/41*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013), h. 408)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Terjemahan :

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya Rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.³⁹

Islam menerangkan dan memberikan peringatan kepada umat manusia agar tetap menjaga alam.⁴⁰ Demikian kedua ayat ini, menjelaskan bahwa setiap manusia dilarang keras oleh Allah SWT untuk berbuat kerusakan dimuka bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan dan Allah akan memberikan hukuman kepada orang yang tidak mematuhi hukumnya.

L. Peran Serta Masyarakat dan Pengawasan Pertambangan Oleh Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengawasan operasionalisasi pertambangan sebagai cermin dihormatinya asas demokrasi di suatu Negara. Hal ini adalah salah satu yang harus dijalankan oleh pemerintah (daerah) dalam upaya mewujudkan *good governance* melalui pelayanan publik yang berkualitas. Masyarakat memiliki peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup antara lain :

1. Peran Serta Masyarakat Secara Umum

Peran Serta masyarakat atau partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan

³⁹ ALWASIM, Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata, QS. Surah Al-Rum : 7/56, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013), h. 157)

⁴⁰ Fattah, Abdul, Kasjim Salenda, and Saleh Ridwan. "TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN KONSERVASI HUTAN." Alauddin Law Development Journal 1.1 (2019).

tanggungjawab bersama. Partisipasi masyarakat dapat pula diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

2. Peran Serta Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup

Peran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor publik telah banyak diakomodir dalam berbagai kebijakan publik di negeri ini. Sejak pengakuan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik diakomodir dalam Pasal 53 UU No. 10/2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, maka banyak UU yang lahir setelah itu yang memuat klausul khusus yang mengatur ihwal partisipasi masyarakat, termasuk UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).⁴¹

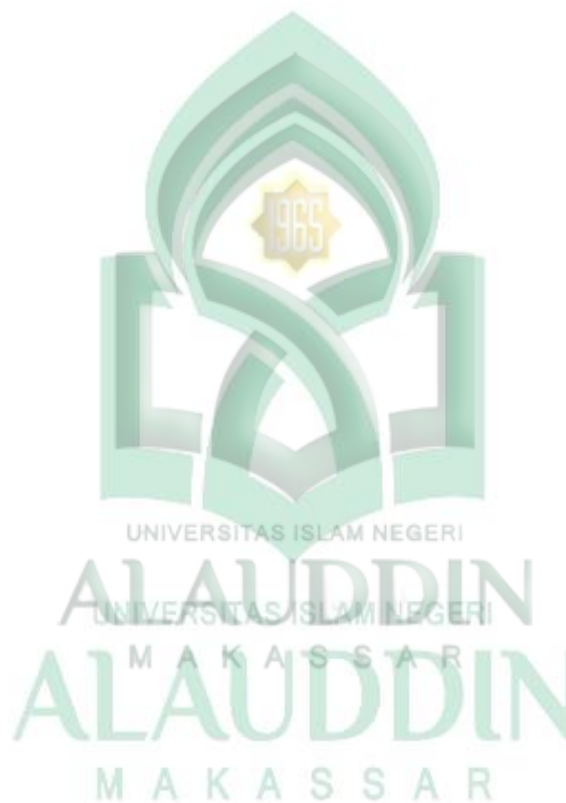
3. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pertambangan

Dalam hal pelayanan publik, prinsip peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan peran serta didalam masalah pertambangan ini juga sejalan dengan konsep baru yang sedang di upaya meningkatkan pelayanan publik dengan cara menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan, tetapi sebagai warga negara yang juga memiliki negara dan pemerintahan yang ada didalamnya, juga terhadap potensi alam yang pada dasarnya adalah milik masyarakat khususnya dimana potensi sumber daya alam itu berada.

Didalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara, peran masyarakat itu tidak disinggung. Pengawasan yang dilakukan cenderung kepada pengawasan secara teknis. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai

⁴¹ Kahfi, Ashabul. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 2.2 (2015): 41-52.

pengawasan terhadap pertambangan yang dilakukan oleh rakyat semenjak turun temurun. Dengan demikian rakyat akan mempunyai akses yang kuat untuk pengelolaan pertambangan. Dan secara administratif satu diantaranya adalah tentang peran serta didalam pengawasan.⁴²



⁴² Samsul Wahidin, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, (Celebon Timur : Pustaka Pelajar, 2019), h. 67

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam ruang lingkup penelitian hukum yang sering dikaitkan dengan jenis penelitian, maka penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kalaena kecamatan Wotu, kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, karena lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh peneliti karena kediaman peneliti sangat dekat dengan lokasi tersebut. Tidak hanya itu peneliti juga dapat dengan mudah menggali informasi di lokasi tambang liar tersebut berada. Karena di lokasi tersebut terdapat penambangan pasir ilegal. Sejauh ini diketahui tidak ada tambang pasir yang didirikan resmi atau mendapatkan izin dan saat ini, ada tiga tambang pasir yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis. Dimana dalam pendekatan ini, peneliti akan meneliti dengan memperhatikan aturan hukum yang akan dikaitkan dengan objek penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari jenis data primer. Dimana Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Tujuan dari suatu penelitian adalah tentunya untuk memperoleh data penelitian yang relevan dan signifikan terhadap suatu masalah yang akan diteliti. Maka dari itu peneliti akan mengumpulkan data melalui penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan atau dalam masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara (Interview)

Dalam wawancara peneliti akan menggunakan teknik sampling untuk mewawancarai narasumber. Dimana teknik sampling tersebut berupa Purposive Sampling yaitu menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Disini peneliti akan menentukan salah satu sampel dari populasi yang ada, dimana sampel yang telah ditentukan adalah orang yang berkompeten untuk memberikan suatu informasi.

b. Observasi

Observasi adalah Melihat dan memahami secara langsung suatu fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan laptop, android dan alat tulis seperti pulpen dan buku.

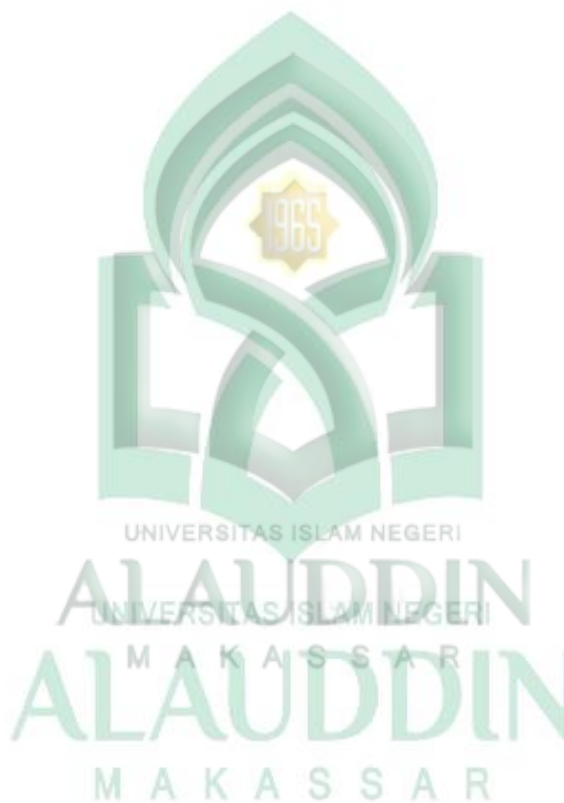
F. Teknik pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan dan analisis data, yaitu :

1. Reduksi data yakni memilah data yang penting atau sesuai dengan topik yang akan dibahas
2. Klasifikasi data yakni pengelompokkan dan pengkategorian hasil penelitian sesuai dengan topik bahasan

3. Penyajian data yakni menyajikan hasil penelitian yang sudah di klasifikasi sesuai dengan topik bahasan dengan memberikan penjelasan secara tersusun.

Setelah data diperoleh maka peneliti akan menganalisis data secara kualitatif yaitu dengan menguraikan atau menjabarkan hasil penelitian secara lebih jelas dan sistematis yang kemudian akan ditarik suatu kesimpulan.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DESA KALAENA KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur

Desa Kalaena merupakan pemekaran dari Desa Tarengge. Bagian Utara Desa Kalaena berbatasan dengan Desa Alambuana, bagian selatan berbatasan dengan Desa Bahari, bagian Timur berbatasan dengan Desa Maliwowo, dan bagian barat berbatasan dengan Desa Karambua. Jumlah penduduk di Desa Kalaena terdiri dari laki-laki sebanyak 628 jiwa dan perempuan sebanyak 616 jiwa. Penduduk Desa Kalaena sendiri mayoritas beragama Islam.

Kecamatan Wotu merupakan salah satu kecamatan yang berada pada wilayah Luwu Timur. Kecamatan Wotu berbatasan dengan Kecamatan Tomoni di sebelah Utara, Kecamatan Angkona sebelah Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone, dan disebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Burau.

Secara geografis, kabupaten Luwu Timur berada di sebelah selatan garis khatulistiwa, tepatnya terletak di antara 2°03'00'' – 3°03'25'' Lintang Selatan dan 119°28'56'' – 121°47'27'' Bujur Timur. Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten Paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas sebelah Utara dan sebelah timur adalah Sulawesi Tengah. Batas sebelah Selatan adalah provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu batas sebelah Barat Kabupaten ini adalah Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Luwu Timur yang ibu kotanya adalah Malili, mempunyai Luas wilayah 6.945,88 km² atau meliputi sekitar 11,14 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi kabupaten Luwu Timur dibagi menjadi 11 kecamatan yaitu kecamatan Mangkutana, Nuha, Towuti, Malili, Angkona, Wotu, Burau, Tomoni, Tomoni Timur, Kalaena dan Wasuponda. Kecamatan Towuti

merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas mencapai 1.820,48 km² atau sekitar 26,21% dari luas wilayah kabupaten Luwu Timur.

Terdapat 13 sungai yang mengalir di wilayah kabupaten Luwu Timur, sungai terpanjang adalah sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di kecamatan Mangkutana, sedangkan sungai terpendek adalah sungai Bambalu dengan panjang 15 km. Selain itu, di kabupaten Luwu Timur juga terdapat 5 danau. Kelima danau tersebut adalah Danau Matano yang berada di kecamatan Nuha, sedangkan Danau Mahalona, Danau Towuti, Danau Taparang Masapi, dan Danau Lontoa berada di kecamatan Towuti. Danau yang terdalam adalah Danau Matani (589 m) dan danau yang terluas adalah Danau Towuti (585 km²).⁴³

B. Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Ilegal di Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak usaha tambang. Baik itu tambang skala besar maupun tambang skala kecil. Tambang yang banyak didirikan di Kabupaten Luwu Timur sendiri yaitu tambang pasir yang termasuk tambang skala kecil. Tambang pasir yang ada di Kabupaten Luwu Timur hampir ada di setiap daerah. Semua tambang pasir yang ada didirikan oleh individu, meskipun sifat tambang pasir dapat juga didirikan dalam bentuk kelompok masyarakat. Sejauh ini di Kabupaten Luwu Timur tidak ada status kepemilikan oleh perusahaan terhadap pengelolaan pasir. Dan penting untuk diketahui bahwa, tambang pasir yang dikelola di Luwu Timur hampir semua berstatus ilegal.

1. Upaya atau Tindakan Kepolisian Dalam Meghadapi Usaha Tambang Pasir Ilegal

Dalam kasus tambang ilegal akan selalu ditangani dan dilimpahkan kepada Kepolisian Resort atau Polres Luwu Timur. Kepolisian adalah instansi tempat

⁴³ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur

dimana pengaduan pertama jika ketidaksesuaian terjadi di lingkungan masyarakat. Lalu tindakan apa dan upaya apa yang telah dilakukan pihak kepolisian terhadap usaha-usaha tambang pasir ilegal di Luwu Timur. Sejauh ini tindakan Kepolisian Resort Luwu Timur hanya sebatas tindakan preventif saja. Tambang pasir yang ada di Luwu Timur, masih dikategorikan sebagai tambang rakyat atau manual yang berskala kecil, yang menyebabkan pihak kepolisian hanya mengambil tindakan preventif.

Sampai saat ini, kepolisian Resort Luwu Timur, belum menggunakan tindakan represif. Kepolisian Resort Luwu Timur hanya melakukan upaya sebatas menghimbau agar pengusaha tambang atau siapapun yang akan mendirikan usaha tambang agar mengurus izin sebisa mungkin.

2. Alasan Pihak Kepolisian Hanya Menggunakan Tindakan atau Upaya Preventif

Alasan pihak kepolisian hanya menggunakan tindakan atau upaya preventif karena tambang pasir sifatnya adalah tambang rakyat, sehingga pasir tidak menggunakan alat modern atau alat yang canggih. Dimana, pengelolaan pasir ini hanya menggunakan alat sederhana saja sehingga pihak kepolisian sendiri menganggap bahwa pengelolaan tambang ini tidak akan membahayakan lingkungan setempat. Tambang yang ada di Luwu Timur khususnya pasir, sifatnya masih dikategorikan sebagai tambang kecil, dimana pelaksanaannya belum mengkhawatirkan lingkungan dan berdampak luas bagi lingkungan. Selain itu, tambang pasir di Luwu Timur adalah bahan galian yang masih dipasarkan atau dijual di wilayah sendiri. Selain itu, pasir yang ada juga tidak diekspor keluar daerah, keluar kota atau bahkan keluar negeri. Terlepas dari itu, pihak kepolisian memaklumi kesulitan masyarakat dalam hal memperoleh surat izin mengingat pengurusan surat izin yang begitu sulit dipenuhi oleh masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ Yakob Lili (43 tahun), Kanit Tipidter dan Tipikor. *Wawancara*, Kepolisian Resort Kab. Luwu Timur, 29 September 2020.

C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Penambangan Pasir Ilegal di Desa Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur

Faktor penghambat penegakan hukum penambangan pasir ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dipengaruhi oleh beberapa hal. Adapun faktor penghambat penegakan hukum penambangan pasir ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Struktur Hukum

Salah satu faktor penghambat penegakan hukum penambangan pasir ilegal di Luwu Timur khususnya di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu dalam hal struktur hukum antara lain :

a. Pelaksana Hukum (Polisi)

Dalam hal penegakan hukum yang salah satu yang berperan penting dalam penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana ialah pihak kepolisian. Polisi sebagai pelaksana hukum memiliki tanggung jawab dalam hal penegakan hukum penambangan pasir ilegal di Kabupaten Luwu Timur. Akan tetapi, pihak kepolisian di Kabupaten Luwu Timur hanya memberikan tindakan preventif dalam kasus-kasus tambang ilegal yang ada di Luwu Timur khususnya di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu. Padahal tindakan preventif yang dilakukan pihak kepolisian masih belum efektif dalam meminimalisir tambang ilegal.

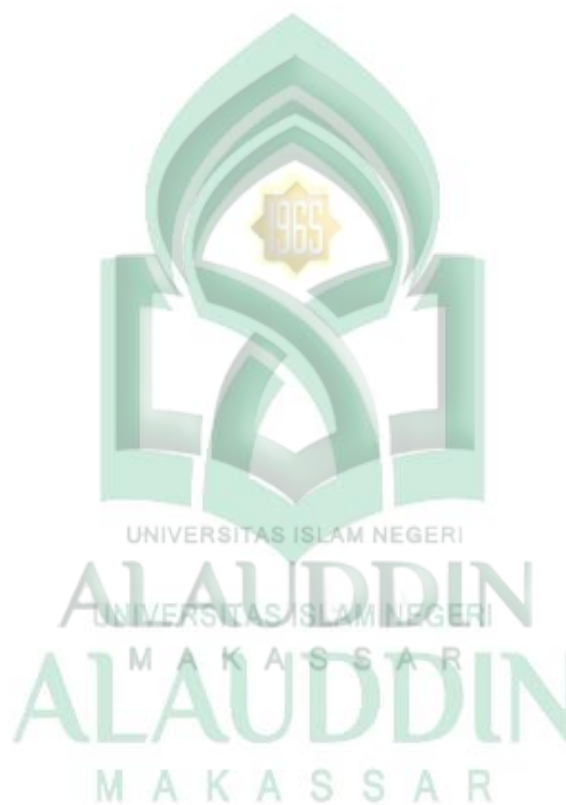
b. Pemerintah Desa Kalaena

Pemerintah Desa Kalaena dalam hal ini kurang memberikan perhatian khusus dalam kasus tambang ilegal di Desa Kalaena. Pasalnya pemerintah desa tidak pernah melakukan pengawasan dan memberikan teguran langsung kepada masyarakat yang mendirikan tambang ilegal.

2. Kultur Hukum Masyarakat

Salah satu penghambat penegakan hukum penambangan pasir ilegal adalah karena kurangnya kesadaran hukum terhadap masyarakat. Mereka cenderung memiliki sifat yang acuh terhadap hukum. Mereka beranggapan bahwa mereka melakukan penambangan di atas tanah hak milik mereka sendiri. Selain itu

masyarakat tidak pernah diberikan sanksi sehingga membuat masyarakat itu sendiri melanjutkan aksi penambangan liar.⁴⁵



⁴⁵ Rusdi (33 Tahun) Selaku Mantan Pemilik Tambang Pasir Ilegal Desa Kalaena. *Wawancara*, Luwu Timur, 1 Oktober 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Penegakan hukum penambangan pasir ilegal di Desa Kalaena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur tidak terlaksana sama sekali. Hal ini ditandai dengan tidak ada satu pun tambang berstatus ilegal yang diberikan sanksi pidana oleh pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian sendiri hanya memberikan upaya sebatas preventif saja.
2. Faktor penghambat penegakan hukum disebabkan oleh pelaksana hukum (polisi) tidak memberikan tindakan yang tegas serta pemerintah Desa Kalaena yang kurang memberikan perhatian khusus terhadap tambang pasir yang ada. Selain itu, kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh warga masyarakat.

B. Saran

Agar penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik, maka adapun saran yang dapat diberikan dalam masalah penambangan pasir ilegal ini antara lain :

1. Sebaiknya pihak kepolisian memberikan tindakan yang tegas untuk memberikan efek jera kepada masyarakat.
2. Sebaiknya pemerintah desa lebih memperhatikan kasus-kasus tambang ilegal yang ada di Desa Kalaena. Seperti memberikan teguran secara langsung atau mengadakan penyuluhan agar masyarakat tergerak untuk menambang dengan mengantongi izin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Haryadi, Dwi. *Pengantar Hukum Mineral dan Batu Bara*. Bangka Belitung: UBB press, 2018

Haryati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015

Irianto, Sulistyowati dan Sidharta. *Metode penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013

Makhfudz, M. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013

Prasetyo, Teguh. *Hukum pidana edisi revisi*. Depok: Rajawali Pers, 2017

Redi, Ahmad. *Hukum pertambangan*. Bekasi-Jawa Barat: Gramata Publishing, 2014

Salim Hs, H. *Hukum pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018

Supramono, Gatot. *Hukum pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Sutedi, Adrian. *Hukum pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Kompilasi Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009

Wahidin, Samsul. *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009

Yuswalina, *Hukum Administrasi Negara*. Malang : Setara Press, 2019

Jurnal, Internet dan Artikel

Abdullah Nasution, pengertian pertambangan, penambangan dan tambang, Bgini Anthar Ghatas Susta Bhavaniyas, 23 Mei 2016,
<http://kehidupannasution.blogspot.com/2016/05/pengertian-pertambangan-penambangan-dan.html?m=1> [Diakses pada 09 Juli 2020]

Achmad Suhaidi.com, Pengertian Sumber Data, Jenis-Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data, SUMBER DATA, 26 Februari 2014,
<https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/> [Diakses pada 31 Mei 2020]

Andi Rustandi.com, Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian, 03 Oktober 2017,
<https://www.andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html> [Diakses pada 31 Mei 2020]

Attaembul Jenius, Q.s ar-ruum ayat 41 beserta artinya, niaayu6787, 06 Juni 2017,
<https://brainly.co.id/tugas/10901863>, [Diakses pada 08 Juli 2020]

Varlord, Apa yang dimaksud dengan ilegal/legal, Azzahrailhamyunus, 30 Mei 2015, <https://brainly.co.id/tugas/2795764>, [Diakses pada 09 Juli 2020]

WikiPedia, Pasir, WikipediA, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasir>, [Diakses pada 09 Juli 2020]

Dosen sosiologi.com, 5 Instrumen Penelitian, Pengertian, Jenis dan Contoh Lengkap, Instrumen Penelitian Menjadi Syarat Terbentuknya Penelitian Yang Berkualitas, 5 Februari 2018, <https://dosensosiologi.com/5-instrumen-penelitian-pengertian-jenis-dan-contoh-lengkap/> [diakses pada 31 Mei 2020]

JAYADI, Ahkam. MEMBUKA TABIR KESADARAN

HUKUM. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 2017, 4.2: 18

KAHFI, Ashabul. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 2015, 2.2: 41-52.

Latif, NNazaruddi. *Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*. Panorama Hukum Vol. 2 No. 2 (2017): h. 150

Mulyono, Andi. *Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia*. *Jurisprudentie*. Vol. 3 No. 2 (2016): h. 27

Natalia, dkk. *Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Illegal Mining*. Diponegoro Law Vol. 6 No. 2 (2017): h. 11

Rivantie, Syarif Saddam. *Hukuman Pidana Akibat Kerusakan Lingkungan Yang dilakukan oleh Korporasi Dalam Industri Tambang*. *Jurisprudentie* Vol. 6 No. 2 (2019): h. 197

SANUSI, Nur Taufik. SYARIAH: ANTARA HUKUM DAN MORAL. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2020, 20.1: 86-97.

Satoto, Sukamto, Bader Johan Nasution. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Untuk Tata kelola Pemerintahan Yang Baik*. *Sains Sasio Huaniora* Vol. 3 No. 1(2019) : h. 72

Tafsirweb, Quran surat Al-A'raf ayat 56, Tafsirweb, <https://tafsirweb.com/2510-quran-surat-al-araf-ayat-56.html>, [Diakses pada 08 Juli 2020]

Undang – Undang

UU No 24 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Tim Redaksi KUHP & KUHP

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YAKOB. LILI-SH.MH
Pekerjaan : POLRI <KANIT IDIK III>
Alamat : DS. PUNCAK INDAH KEC. MALILI
KAB. LUWU TIMUR

Menerangkan bahwa :

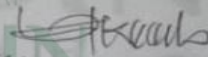
Nama : ANGEY RAHMAN
NIM : 10900117012
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, Januari 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR


YAKOB. LILI-SH.MH
Narasumber

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DESA KALAENA KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR**” bernama lengkap **ANGGY RAHMAN**, Nim : 10400117012. Lahir di Pawosoi, 05 April 1999 merupakan putri bungsu dari pasangan bapak ABD.Rahman dan ibu Matahari. Tepatnya anak ke lima dari lima bersaudara.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar 134 Kalaena di Luwu Timur sejak tahun 2005-2011. Sampai penulis menempuh pendidikan di SMP NEGERI 1 LUWU TIMUR sejak tahun 2011-2014. Dengan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 2 LUWU TIMUR sejak tahun 2014-2017. Kemudian tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan lulus di jurusan ilmu hukum pada fakultas Syariah & Hukum. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan tepat pada tahun 2021 dengan lama studi 3 tahun 5 bulan 16 hari.